

Itsbat nikah pada perkawinan poligami yang diajukan setelah perceraian perkawinan pertama ditinjau dari uu perkawinan dan hukum islam analisis penetapan no 8/PDT.G2013/PA.SGR = Proposing itsbat nikah to legalize marriage in polygamy after divorcing first marriage case study the decree of singaraja religious court number 8/PDT.G2013/PA.SGR)/ Amanda Debrina

Amanda Debrina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20412622&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini membahas itsbat nikah pada perkawinan poligami yang diajukan setelah perceraian perkawinan pertama. Saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Masyarakat tidak mengetahui dampak dari perkawinan di bawah tangan. Namun, KHI mengatur bahwa perkawinan di bawah tangan dapat disahkan dengan cara itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana status itsbat nikah terhadap perkawinan poligami yang diajukan setelah perceraian perkawinan pertama, bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami yang telah mendapat penetapan itsbat nikah dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang telah mendapatkan itsbat nikah adalah perkawinan yang sah, akibat hukumnya adalah isteri, anak, dan perkawinannya mendapat kepastian hukum, dan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr adalah tepat.

ABSTRACT

This thesis examines marriage itsbat of polygamy marriage after divorcing first marriage. There are many unregistered marriage. They do not understand the bad impact of unregistered marriage. However, KHI mentions that unregistered marriage can apply to the Religious Court for ?itsbat nikah? petition. The problem in this thesis are how is the status of marriage itsbat on marriage polygamy after a divorce with the first marriage, the consequences of the polygamous marriage after marriage itsbat and whether Decree of Religious Court of Singaraja Number 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr is already appropriate and correct or not. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive analytical. The conclusion of those problems are polygamous marriages after ?itsbat nikah? petition is legal, the consequences are wife, children, and its marriage get legal certainty, Decree of

Religious Court of Singaraja Number 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr is correct and appropriate.